

## Reformasi pendidikan di Jepang pasca Perang Dunia II

Susy Ong

Universitas Indonesia

Bangkit kembalinya Jepang pasca kekalahan dalam Perang Dunia II, menjadi pusat kekaguman dunia, termasuk kita di Indonesia. Pembangunan SDM melalui pendidikan, menjadi kunci utama keberhasilan Jepang tersebut. Ini tentu bisa menjadi rujukan bagi kita dalam merumuskan kebijakan pembangunan SDM ke depan.

Kita sering merasa kagum akan keseriusan pemerintahan Jepang dalam menangani masalah pendidikan, namun kita juga cenderung mengabaikan sejumlah fakta di lapangan.

Misalnya, pasca kekalahan perang, para akademisi dan birokrat Jepang segera melakukan introspeksi dan riset untuk mencari tahu penyebab kekalahan. Dari hasil riset tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa ada kesalahan fatal pada kebijakan dan filosofi pendidikan selama ini; berangkat dari pemahaman tersebut, segera dilakukan revisi undang-undang pendidikan secara signifikan. Artinya, yang dilakukan oleh pemerintah Jepang bukan hanya memperhatikan pendidikan, tetapi mengubah total kebijakan pendidikan.

Di samping itu, kita juga cenderung lupa pada fakta bahwa pada tahun 1945, Jepang kalah dalam perang melawan Amerika. Konsekuensinya, selama 7 tahun, 1945-1952, Jepang diduduki oleh Amerika, dan Amerika telah memerintahkan kepada Jepang untuk mengubah semua kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, sesuai dengan instruksi Amerika.

Dalam tulisan ini, kita akan melihat apa saja perubahan landasan filosofis dan perubahan kebijakan, serta bagaimana proses pembahasan hingga disusun dan disahkannya sejumlah UU pendidikan baru, dan apa kritik dan harapan yang tersirat di dalam UU pendidikan tersebut.

Kata kunci: introspeksi pasca kekalahan perang, tim penasihat pendidikan dari Amerika, reformasi UU pendidikan, Nanbara Shigeru, filosofi pendidikan nasional Johann Gottlieb Fichte, ketrampilan dan rasa tanggung jawab sosial

- I. Reaksi dunia pendidikan terhadap kekalahan perang
- II. Tim pakar pendidikan dari Amerika
- III. Rekonstruksi pasca perang diawali dari UU Pendidikan baru
- IV. Nanbara Shigeru dan pendidikan pembentukan karakter bangsa
- V. Kesimpulan

### **I. Reaksi dunia pendidikan terhadap kekalahan perang**

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito melalui siaran radio mengumumkan bahwa pemerintah Jepang secara resmi menerima tuntutan Sekutu yang tercantum di dalam Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam adalah deklarasi bersama yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1945 di Potsdam, Jerman, oleh para pemimpin Sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman (Amerika Serikat), Perdana Menteri Winston Churchill (Inggris) dan Presiden Chiang Kai-Shek (Republik Cina), yang menyerukan agar Jepang

meletakkan senjata dan melepaskan seluruh tanah jajahannya. Dengan diterimanya Deklarasi Potsdam oleh Jepang, berarti Jepang secara resmi mengakui kekalahan dari kubu Sekutu<sup>1</sup>.

Keesokan harinya, tanggal 16, kabinet di bawah pimpinan laksamana angkatan laut, mengundurkan diri. Tanggal 17, kabinet baru di bawah pimpinan perdana menteri sipil, dilantik.

Meskipun kekalahan perang sudah diprediksi oleh banyak pihak, namun tetap saja siaran radio tersebut membuat banyak pihak tercengang. Pada birokrat dan akademis segera mulai membentuk pokja untuk membahas penyebab kalah perang, dan menyimpulkan bahwa Jepang kalah dari Amerika karena pendidikan Jepang gagal, sehingga kualitas SDM Jepang lebih buruk dibandingkan dengan SDM Amerika.

Pada tanggal 15 September 1945, yaitu tepat 1 bulan setelah pengumuman kalah perang, pemerintah Jepang melalui menteri pendidikan mengeluarkan 'Pedoman Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Jepang Baru,' yang berisi 11 pedoman kerja:

1. Pendidikan bertujuan memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir secara ilmiah, membina semangat cinta damai dan meningkatkan moralitas rakyat
2. Menghapus semua mata pelajaran yang terkait dengan militer, semua pengajaran dan penelitian harus difokuskan untuk tujuan damai
3. Merevisi buku paket agar isinya sesuai dengan kebijakan pendidikan baru
4. Kementerian pendidikan menyelenggarakan program pendidikan ulang (re-edukasi) untuk para guru, agar memahami kebijakan pendidikan yang baru
5. Memberi kesempatan pembelajaran khusus untuk para murid yang telah dikerahkan ke medan perang atau ke pabrik sehingga putus sekolah
6. Pendidikan ilmiah yang bertujuan melatih kemampuan berpikir secara ilmiah dan bukan hanya demi mengejar kepentingan sesaat
7. Untuk membina rakyat yang bermoralitas tinggi dan berwawasan luas, perlu ditingkatkan pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa dan pekerja, melalui fasilitas umum seperti perpustakaan umum dan museum, serta memanfaatkan media seperti pameran lukisan, pertunjukan teater, penerbitan buku-buku ilmu pengetahuan populer dan sebagainya
8. Akan memfasilitasi pembentukan karang taruna tingkat lokal, sebagai wadah komunikasi dan pembinaan solidaritas sosial
9. Akan upayakan kerja sama antar agama untuk membina persahabatan dan perdamaian dunia
10. Akan memfasilitasi acara pertandingan olah raga untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, serta membina semangat fair play serta persahabatan sesama anak bangsa dan antara rakyat Jepang dengan warga negara lain
11. Akan melakukan restrukturisasi kementerian pendidikan untuk membentuk direktorat olah raga dan direktorat pendidikan ilmiah

---

<sup>1</sup> Menurut konstitusi Jepang yang berlaku sampai dengan tahun 1945, kaisar berwenang mendeklarasikan mulai dan berakhirnya perang. Pada tanggal 8 Desember 1941, segera setelah militer Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika di Samudra Pasifik, kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan bahwa Jepang mulai berperang dengan kubu koalisi Amerika, Inggris, China dan Belanda.

Perlu kita catat bahwa pendudukan Sekutu atas Jepang (SCAP)<sup>2</sup> resmi dimulai pada tanggal 12 September. Setelah itu, pada tanggal 22 Oktober, SCAP mengeluarkan instruksi kepada pemerintah Jepang terkait revisi sistem pendidikan<sup>3</sup>. Artinya, Pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 September tersebut, murni merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan oleh para birokrat dan akademisi pemerhati masalah pendidikan di Jepang.

11 poin di atas juga mencerminkan keprihatinan para akademisi dan birokrat terhadap kondisi sosial Jepang menjelang akhir perang: masyarakat cenderung apatis, egois, bodoh, kriminalitas meningkat, pasrah sehingga tidak berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup. Momentum berakhirnya perang, dijadikan titik awal untuk mengubah pola hidup dan mentalitas masyarakat, melalui pendidikan.

## **II. Tim pakar pendidikan dari Amerika**

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuh bom atom oleh militer Amerika. Pada tanggal 10, pemerintah Jepang mengirim telegram kepada pemerintah Amerika, menyatakan bersedia menerima himbuan dalam Deklarasi Potsdam. Pada tanggal 11, menteri luar negeri Amerika James F. Byrnes, atas nama pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Republik China, mengirim telegram kepada pemerintah Jepang, menyatakan bahwa jika Jepang menyerah tanpa syarat sebagaimana himbuan dalam Deklarasi Potsdam, maka pihak Sekutu akan menyerahkan kepada rakyat Jepang untuk menentukan bentuk pemerintahan di Jepang di kemudian hari. Menanggapi pernyataan dari Sekutu tersebut, pemimpin Jepang menyusun teks pernyataan perang berakhir; teks tersebut selesai disusun pada tanggal 14, dan diumumkan oleh kaisar Hirohito kepada seluruh rakyat Jepang (himbuan untuk meletakkan senjata) melalui siaran radio.

Dengan pengumuman resmi kekalahan perang, semua pejabat sipil dan militer yang pro perang mengundurkan diri, digantikan oleh para tokoh anti perang. Mereka inilah bekerja sama dengan para pejabat sipil SCAP untuk melakukan perombakan signifikan atas sejumlah kebijakan di Jepang, termasuk kebijakan pendidikan.

Mengantisipasi akan dimulainya pendudukan Sekutu di Jepang, pada tanggal 26 Agustus, pemerintah Jepang membentuk Central Liaison Office (Kantor Penghubung Pusat)<sup>4</sup> sebagai lembaga koordinasi untuk menampung instruksi dari SCAP dan meneruskannya kepada lembaga eksekutif Jepang.

Tanggal 2 September, di atas kapal perang Missouri yg berlabuh di teluk Tokyo, menteri luar negeri Jepang, Shigemitsu Mamoru, atas nama pemerintah Jepang menandatangani dokumen pernyataan kekalahan Jepang. Tanggal 12, pendudukan Sekutu (SCAP) di bawah pimpinan Jendral MacArthur secara resmi dimulai, dengan agenda utama de-militerisasi dan demokratisasi Jepang.

---

<sup>2</sup> Supreme Commander of Allied Powers in Japan (Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Jepang); Sekutu terdiri dari Amerika, Inggris, Perancis, Uni Soviet dan China. Namun pada kenyataannya, hanya Amerika yang menduduki Jepang, sehingga semua kebijakan pendudukan di Jepang adalah sesuai dengan keinginan dan kepentingan Amerika.

<sup>3</sup> Pendudukan Amerika di Jepang adalah secara tidak langsung. Pemerintahan tetap dijalankan oleh lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif Jepang, namun semua kebijakan yang diambil harus sesuai dengan instruksi dari SCAP, dengan pemimpin tertinggi Jendral Douglas MacArthur yang merupakan wakil dari pemerintahan Amerika.

<sup>4</sup> Dalam bahasa Jepang: shuusen renraku chuuo jimukyoku. Setelah masa pendudukan berakhir pada tahun 1952, lembaga ini menjadi direktorat kerja sama internasional di bawah kementerian luar negeri Jepang.

SCAP beranggapan bahwa Jepang mengobarkan Perang Asia Pasifik karena militer didukung oleh rakyat, dan rakyat mendukung militer karena telah dididik untuk patuh membabi buta pada pimpinan, tidak mampu berpikir logis serta militan. Dengan kata lain, militerisme Jepang, yang ditandai dengan rakyat yang fanatik dan radikal, fanatik karena percaya bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang paling unggul di dunia (ultra-nasionalistik), dan radikal sehingga sampai nekad melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, de-militerisasi (=deradikalisasi) harus dimulai dengan merombak total sistem dan materi pendidikan.

Pada tanggal 22 Oktober, melalui Kantor Penghubung Pusat, SCAP menyampaikan instruksi terkait sistem pendidikan Jepang:

1. Melarang penyebaran ideologi serta pendidikan militeristik dan ultra-nasionalisme
2. Menanamkan pemahaman mengenai perdamaian, hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berserikat dan berpendapat
3. Mengevaluasi semua guru dan pejabat di lembaga pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dan memutuskan personel-personel mana saja yang harus dipertahankan, dipecat, dikembalikan ke jabatan semula (untuk personel yang sebelumnya telah dipecat), diangkat, diberikan re-edukasi atau dimutasi.
4. Mendorong para murid, guru maupun pejabat di lembaga pendidikan untuk mengkritisi seara logis materi pengajaran, serta berdiskusi mengenai topik politik, sosial dan kebebasan beragama.
5. Mensosialisasikan informasi mengenai peran para pemimpin militer yang telah mengobarkan perang dan menyengsarakan kehidupan rakyat banyak
6. Segera terbitkan buku ajar baru dan buku pedoman pengajaran baru bagi guru, yang bertujuan mendidik calon warga negara yang cinta damai dan memiliki rasa tanggung jawab sosial

Selanjutnya, pada tanggal 30, SCAP kembali mengeluarkan instruksi yang secara implisit ditujukan kepada kementerian pendidikan Jepang, agar mempercepat evaluasi dan eksekusi terhadap para guru serta pejabat lembaga pendidikan.

Pada tanggal 31 Desember, SCAP mengeluarkan instruksi terkait penghentian mata pelajaran pendidikan moral, sejarah Jepang dan geografi Jepang. Ini adalah karena di Jepang selama era perang, mata pelajaran pendidikan moral mengajarkan bahwa rakyat harus patuh, bahkan harus rela mati demi kaisar; mata pelajaran sejarah berisi mitos bahwa Jepang adalah adalah negeri dewa; mata pelajaran geografi berisi materi propaganda bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, sehingga sah bagi Jepang untuk menguasai seluruh wilayah Asia.

Memasuki tahun 1946, salah satu direktorat di bawah SCAP, yaitu CIE (Civil Information and Education Section) menganggap perlu merumuskan kebijakan pendidikan terpadu untuk Jepang<sup>5</sup>. Untuk itu, pada bulan Maret, CIE mendatangkan tim penasehat masalah pendidikan dari Amerika. Agar tim dari Amerika tersebut dapat bekerja dengan efektif, maka sebelumnya menteri pendidikan menunjuk dan membentuk Dewan Pakar Pendidikan Jepang, yang akan berperan sebagai mitra bagi rekannya dari Amerika.

---

<sup>5</sup> Ketua CIE, seorang pejabat militer yang kebetulan belum berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, merasa rendah diri karena harus berhadapan dengan para wakil dari Jepang yang semuanya adalah elit di dunia akademik. Oleh karena itu, ia ingin menunjukkan superioritas dirinya (=Amerika) dengan mendatangkan tim dari Amerika yang seluruh anggotanya bergelar doktor.

Awal Maret 1946, tim Misi Pendidikan Amerika (the United States Education Mission to Japan) tiba di Jepang. Tim ini beranggotakan 27 orang, dipimpin oleh George D. Stoddard, direktur direktorat pendidikan negara bagian New York. Sedangkan mitra mereka selama di Jepang, yaitu Dewan Pakar Pendidikan, beranggotakan 29 orang, diketuai oleh Nanbara Shigeru, rektor Universitas Tokyo (mengenai filosofi pendidikan Nanbara, akan dibahas di bagian berikut).

Selama 1 bulan, tim Misi Pendidikan Amerika melakukan kunjungan ke instansi pendidikan di Jepang, dan mengadakan diskusi dengan Dewan Pakar Pendidikan Jepang. Pada akhir Maret, tim Misi Pendidikan Amerika menyerahkan laporan rekomendasi reformasi kebijakan pendidikan Jepang, kepada SCAP.

Laporan tersebut pertama-tama menyimpulkan bahwa SCAP tidak perlu terlalu antusias membasmi paham militerisme dan radikalisme dalam dunia pendidikan Jepang; biarkan bangsa Jepang sendiri yang membangun kembali sistem pendidikan mereka dengan unsur-unsur budaya lokal; SCAP cukup memberi dukungan saja kepada usaha-usaha bangsa Jepang.

Selanjutnya, laporan tersebut memuat sejumlah rekomendasi terkait revisi sistem pendidikan:

1. Sistem pendidikan Jepang terlalu tersentralisir dan di-dikte oleh birokrat pusat, sehingga para guru tidak bisa mengembangkan materi ajar sesuai kondisi dan kebutuhan lokal, dan akibatnya proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan desentralisasi sistem pendidikan, supaya pemma maupun guru dapat berinovasi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran.
2. Libatkan masyarakat lokal dalam pembahasan kurikulum pendidikan
3. Mata pelajaran pendidikan moral, yang sebelumnya berisi materi untuk mengajarkan kepatuhan mutlak kepada atas, harus diubah isinya, menjadi materi yang mengajarkan sikap hidup bermasyarakat yang mencerminkan kesetaraan, semangat kerja sama berdasarkan prinsip demokrasi, dan semangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan sehari-hari.
4. Untuk mata pelajaran sejarah Jepang, bedakan antara fakta dengan mitos; untuk mata pelajaran geografi, tambahkan materi tentang geografi masing-masing daerah.
5. Perlu bangun fasilitas untuk olah raga, kesehatan dan hiburan di sekolah maupun universitas
6. Beri pelatihan profesi pada semua sekolah
7. Ubah sistem pendidikan yang mengutamakan hafal mati, penyeragaman materi ajar dan pemaksaan kepatuhan; beri pelatihan agar siswa mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara yang demokratis.
8. Untuk itu, perlu diadakan program re-edukasi bagi para guru, agar memiliki wawasan yang luas dan pengetahuan yang mendalam.
9. Perlu segera sosialisasikan makna demokrasi dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; dan untuk itu, perlu ditingkatkan pendidikan luar sekolah melalui perpustakaan umum, museum serta pelaksanaan kuliah umum bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan dan informasi tidak boleh lagi menjadi monopoli segelintir elit, tetapi harus disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika kita bandingkan rekomendasi tim dari Amerika (Maret 1946) dengan Pedoman yang diumumkan oleh kementerian Jepang tanggal 15 September 1945, terlihat ada kesamaan persepsi mengenai arah reformasi kebijakan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan persepsi antara pemerintah

Jepang pasca kekalahan perang dengan pemerintah Amerika, yaitu bahwa perang terjadi karena rakyat Jepang telah disesatkan dan dibuat bodoh oleh sistem dan materi pendidikan yang salah. Oleh karena itu, agar tragedi perang tidak terulang lagi, sistem dan materi pendidikan harus diubah sedemikian rupa supaya dapat membuat rakyat menjadi berpengetahuan luas dan mampu berpikir kritis.

### III. Rekonstruksi pasca perang diawali dari UU Pendidikan baru

Setelah tim tersebut kembali ke Amerika pada akhir Maret 1946, Dewan Pakar Pendidikan pun dibubarkan. Pada bulan Agustus, kementerian pendidikan Jepang membentuk Dewan Reformasi Pendidikan (Kyouiku Sasshin Iinkai; selanjutnya disingkat DRP), yang bertugas menyusun undang-undang terkait pendidikan, berdasarkan rekomendasi dari tim Misi Pendidikan Amerika. Para mantan anggota Dewan Pakar Pendidikan kembali diminta untuk masuk ke dalam DRP. Jabatan ketua DRP dipegang oleh menteri pendidikan, sedangkan wakil ketua dijabat oleh Nanbara Shigeru.

Setelah dibentuk, DRP segera bekerja untuk merumuskan rekomendasi untuk penyusunan UU pendidikan. 3 bulan kemudian, pada bulan November 1946, DRP mengajukan rekomendasi I kepada pemerintah, terkait tujuan pendidikan ke depan, serta perlunya menerbitkan UU Pokok Pendidikan (UU yang menjadi landasan bagi UU pendidikan lainnya).

Dalam rekomendasi I tersebut disebutkan bahwa:

1. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan kepribadian murid; membentuk warganegara yang demokratis dan cinta damai, menegakkan kebenaran dan keadilan, menghargai martabat orang lain, menjunjung tinggi sikap rajin bekerja dan tanggung rasa; serta membina warganegara yang sehat secara jasmani maupun rohani.
2. Pendidikan tidak boleh hanya dibatasi oleh waktu dan ruang (institusi pendidikan dan masa studi). Oleh karena itu, setiap warga negara harus diarahkan agar dapat belajar atas inisiatif sendiri, kapan saja dan di mana saja. Tujuan pendidikan adalah mencetak individu-individu yang terus belajar dan bekerja sama, sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan kebudayaan baru.
3. Dalam UU Pokok Pendidikan, harus dicantumkan hal-hal berikut:
  1. Bahwa pendidikan di Jepang selama ini jauh dari memadai, karena terlalu menekankan formalitas dan memaksakan penyeragaman
  2. Bahwa berhasil tidaknya pembangunan negara Jepang ke depan berlandaskan konstitusi baru<sup>6</sup>, akan tergantung pada arah kebijakan pendidikan yang baru
4. Dalam UU Pokok Pendidikan harus dicantumkan dengan jelas hal-hal berikut ini:
  1. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan
  2. Wajib belajar
  3. Pendidikan untuk putri
  4. Pendidikan luar sekolah
  5. Pendidikan politik

---

<sup>6</sup> Pasca kekalahan perang, konstitusi Jepang dinyatakan tidak berlaku lagi. Konstitusi baru, yang mencantumkan bahwa kaisar adalah simbol negara, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan sebagai pernyataan sikap bahwa rakyat Jepang cinta damai, maka Jepang tidak akan memiliki angkatan bersenjata dan Jepang tidak akan terlibat dalam perang dengan negara mana pun, disahkan pada tanggal 3 November 1946, mulai berlaku sejak 3 Mei 1947.

6. Pendidikan agama
7. Jenis-jenis sekolah
8. Peraturan tentang guru
9. Administrasi pendidikan
5. Bahwa kementerian pendidikan akan menyusun UU Pokok Pendidikan, yang memuat poin-poin di atas.

Selanjutnya, dalam rekomendasi tertanggal 27 Desember 1946, diajukan usul-usul mengenai administrasi pendidikan yang harus direvisi, yaitu:

1. Perlu dilakukan perubahan atas sistem administrasi pendidikan yang berlaku selama ini, karena terlalu birokratis, memaksakan keseragaman dan mementingkan formalitas;
2. Pihak sekolah perlu menghargai usul yang wajar dari masyarakat terkait pendidikan
3. Pihak sekolah dan guru perlu diberi wewenang untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing, dan perlu desentralisasi birokrasi pendidikan
4. Perlu komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antar guru dan antara pelaku pendidikan sekolah dengan pelaku pendidikan luar sekolah
5. Perlu ditingkatkan penelitian dan survei yang terkait dengan pendidikan
6. Perlu dibenahi keuangan untuk pendanaan pendidikan.

Berdasarkan poin-poin rekomendasi dari DRP, kementerian pendidikan menyusun dan mengesahkan UU Pokok Pendidikan (disahkan tanggal 31 Maret 1947). Selanjutnya, berlandaskan prinsip yang tertuang di dalam UU ini, berturut disahkan UU Pendidikan Sekolah (disahkan pada tanggal yang sama) dan UU Pendidikan Luar Sekolah (disahkan 10 Juni 1949).

Dalam UU Pokok Pendidikan, dicantumkan bahwa ‘tujuan pendidikan adalah membina warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohani serta memiliki karakter yang layak sebagai anggota masyarakat dan negara yang cinta damai dan demokratis.’ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para peserta didik harus ‘memperluas pengetahuan dan wawasan, melatih diri agar selalu mencari kebenaran, peka dan berakhlak mulia, serta berusaha agar selalu berbadan sehat; berjiwa mandiri dan kreatif, menjunjung tinggi nilai bekerja; bertanggung jawab dan bersikap adil, menjunjung tinggi kesetaraan gender, bisa bekerja sama dengan orang lain, berjiwa sosial, proaktif dalam berkontribusi bagi masyarakat; menghargai semua makhluk hidup, berkontribusi bagi pelestarian lingkungan; patriotik sekaligus mau menghargai budaya negara lain, proaktif berkontribusi bagi perdamaian dan kemajuan dunia.’

Dalam UU Pendidikan Sekolah, dicantumkan bahwa tujuan pendidikan adalah membekali para siswa dengan kompetensi untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.

Sedangkan dalam UU Pendidikan Luar Sekolah diatur bahwa tiap pemda berkewajiban membentuk Dewan Pendidikan Luar Sekolah, untuk membangun dan mengelola fasilitas umum pendidikan luar sekolah, seperti perpustakaan umum, museum dan gelanggang remaja, menyelenggarakan acara diskusi, kuliah umum, pameran dan sebagainya guna sosialisasi ilmu pengetahuan populer, memberi pelatihan ketrampilan profesi kepada masyarakat setempat, serta menyelenggarakan pertunjukan musik dan musik, pameran lukisan dan sebagainya.

Selama pendudukan oleh Amerika, slogan yang ‘dipaksakan’ oleh Amerika ke Jepang adalah ‘demokrasi.’ Namun, dalam pasal-pasal dari UU pendidikan yang disahkan selama masa pendudukan Amerika tersebut, penekanannya justru pada ‘menjunjung tinggi kebenaran dan prinsip ilmiah’ dan ‘rajin belajar dan bekerja.’ Berikut ini kita akan melihat apa saja landasan pemikiran pada konseptor UU tersebut, dengan fokus pada Nanbara Shigeru, wakil ketua (dan kemudian ketua) DRP.

#### **IV. Nanbara Shigeru dan pendidikan pembentukan karakter bangsa**

Tokoh Jepang yang paling berpengaruh dalam proses pembahasan dan penyusunan UU pendidikan pasca perang, adalah Nanbara Shigeru, rektor Universitas Tokyo yang menjabat ketua Dewan Pakar Pendidikan (sebagai mitra untuk tim Misi Pendidikan Amerika) dan wakil ketua (sejak Nov. 1947: ketua) DRP.

Nanbara lahir pada tahun 1889 di keluarga miskin di Kagawa, Jepang selatan. Berkat tekun belajar dan bantuan dana dari sanak keluarga, ia berhasil melanjutkan studi ke SMA di Tokyo, dan kemudian di Fakultas Hukum Universitas Imperial Tokyo, lembaga pendidikan paling bergengsi di Jepang waktu itu.

Selama belajar di SMA, dipengaruhi oleh kepala sekolahnya, Nitobe Inazo, tokoh Kristen dan penulis buku *BUSHIDO*, yang sangat terkenal waktu itu di Eropa dan Amerika<sup>7</sup>. Dan ketika kuliah, Nanbara ikut klub studi alkitab di bawah arahan Uchimura Kanzo<sup>8</sup>, dan masuk Kristen. Sebagai pengikut Uchimura, Nanbara selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa umat Kristen Jepang harus memiliki iman sekaligus patriotisme.

Setelah lulus pada tahun 1914, Nanbara bekerja pada kementerian dalam negeri. Pada tahun 1921, ia memutuskan untuk kembali ke kampus; setelah berkesempatan untuk belajar ke Inggris dan Jerman, ia mulai mengajar ilmu politik di alma mater-nya.

Sejak alih profesi menjadi akademisi, Nanbara fokus melakukan penelitian mengenai pemikiran filsuf Jerman, Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), yang berkarya di awal abad ke-19, yaitu masa kejayaan Napoleon dan negeri Jerman<sup>9</sup> diduduki (dijajah) oleh Perancis. Fichte harus menghadapi fakta bahwa secara militer, negerinya diduduki oleh tentara Perancis, dan rakyat apatis dan frustrasi. Pada tahun 1807-1808, Fichte memberi kuliah umum di akademi di Berlin, mengenai ide-ide untuk membangun kembali negeri Jerman. Materi dari 14 kali kuliah umum tersebut kemudian diterbitkan dengan judul *Reden an die deutsche Nation* (Pesan-pesan kepada Bangsa Jerman). Esensi argument Fichte dalam buku tersebut adalah bahwa bangsa Jerman dapat bangkit dari keterpurukan (kondisi terjajah dan hina) hanya melalui pendidikan yang sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu:

---

<sup>7</sup> Nitobe masuk Kristen sejak usia remaja, menyelesaikan pendidikan tinggi di Amerika dan Jerman, dan menikah dengan perempuan Amerika. Pada tahun 1900, Nitobe menerbitkan buku berjudul *BUSHIDO: THE SOUL OF JAPAN*. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di Amerika, dengan tujuan memaparkan budaya Jepang yang unggul, agar bangsa-bangsa Barat tidak lagi menganggap Jepang sebagai bangsa yang tidak berbudaya. Buku ini menjadi best seller di Amerika, bahkan dipuji oleh Presiden Amerika waktu itu, Theodore Roosevelt. Sifat-sifat ‘BUSHIDO’ yang dipaparkan dalam buku ini, sebenarnya adalah semangat Protestan.

<sup>8</sup> Uchimura terkenal dengan slogan 2 J: I for Japan, Japan for the world, the world for Christ (Jesus), and all for God (saya untuk Jepang, Jepang untuk dunia, dunia untuk Kristus; semua demi Tuhan)

<sup>9</sup> Negara Jerman yang kita kenal sekarang, lahir pada tahun 1871, ketika 26 negara kecil berbahasa Jerman menyatakan bersatu membentuk kekaisaran Jerman. Pada saat perang Napoleon di awal abad ke-19, terdapat sekitar 300 negara-negara kecil berbahasa Jerman.



1. Pendidikan harus bersifat egaliter, tidak boleh elitis, tidak boleh feodal; tidak boleh ada pendidikan yang hanya untuk kelas tertentu; pendidikan nasional harus seragam untuk semua anak negeri
2. Pendidikan untuk siswa dan siswi harus sama, tidak boleh dibedakan
3. Pendidikan harus bersifat wajib, tidak boleh diserahkan kepada keinginan peserta didik
4. Untuk menanamkan semangat nasionalisme, pendidikan harus diberikan dalam bahasa Jerman
5. Pengajaran ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan pelatihan ketrampilan
6. Sekolah harus menjadi institusi di mana para siswa diberi kesempatan untuk berlatih dalam bermasyarakat

Fichte mengkritik kelas borjuis Jerman yang mengagung-agungkan demokrasi dan kebebasan sipil. Menurutnya, adalah kewajiban warga negara untuk belajar dan memperoleh ketrampilan, bekerja untuk mencari nafkah dengan layak, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan negara.

Sekitar 100 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918, Jerman kembali kalah perang, kali ini kalah dalam Perang Dunia I. Untuk menyemangati rakyat agar mau berusaha bangkit kembali, buku Fichte tersebut kembali dijadikan pegangan.

Nanbara melanjutkan studi ke Jerman pada tahun-tahun setelah Jerman kalah perang, menyaksikan kebangkitan bangsa Jerman dari keterpurukan akibat kalah perang, dan menyadari pentingnya 'pendidikan nasional' untuk menanamkan semangat patriotisme dan menjunjung tinggi nilai bekerja, sebagai modal utama bangsa untuk bangkit dari keterpurukan.

Dalam UU Pokok Pendidikan, tampak jelas pengaruh Fichte. Ini sekaligus membuktikan bahwa reformasi pendidikan di Jepang pasca kekalahan perang, dilakukan atas inisiatif orang Jepang sendiri, dan minim campur tangan dari pihak Amerika. Dikotomi 'demokrasi' atau 'kebebasan individu' ala Amerika Vs 'sistem otoriter' atau 'sikap patuh' ala Jepang, tidak berlaku. Atas inisiatif Nanbara, 'Roh' bagi kebijakan pendidikan pasca perang diambil dari Fichte (Jerman), karena adanya kesamaan kondisi dan agenda nasional antara Jerman di tahun 1808 dan 1918, dengan Jepang di tahun 1945, yaitu kondisi kalah perang dan agenda rekonstruksi nasional.

## V. Kesimpulan

Reformasi kebijakan pendidikan merupakan faktor utama keberhasilan rekonstruksi Jepang pasca kekalahan perang di tahun 1945. Reformasi (=pengubahan) ini dilandasi oleh kesadaran bahwa Jepang kalah perang karena kualitas SDM jauh lebih buruk dari pada Amerika, dan buruknya kualitas SDM Jepang adalah karena kebijakan pendidikan yang keliru.

Buruknya kualitas SDM Jepang, ditandai dengan kurangnya penguasaan teknologi dan kemampuan berpikir secara ilmiah (=logis) pada warga negara Jepang, serta pola pendidikan hafal mati yang mematikan inisiatif dan rasa tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus diubah, dengan menekankan pentingnya mendidik murid agar berpengetahuan dan berwawasan luas, serta membekali murid dengan ketrampilan konkrit dalam bermasyarakat dan dalam bekerja mencari nafkah.

Pembahasan dan pengesahan UU pendidikan baru, dilakukan selama era di mana Jepang diduduki oleh Amerika. Namun, konten dari UU pendidikan tersebut justru mencerminkan pemahaman dan harapan pemerintah Jepang, yaitu membangun kembali negara Jepang melalui pendidikan, untuk menghasilkan

warga negara yang berpengetahuan luas serta berketrampilan kerja, sehingga dapat hidup sejahtera; karena rasa tanggung jawab sosial dan semangat nasionalisme dapat tumbuh jika hidup sejahtera.

Bahwa pemerintah Jepang dapat merumuskan dan mengesahkan UU pendidikan dalam waktu singkat, adalah karena mereka tidak perlu melakukan penelitian dari nol, tetapi cukup mengambil contoh keberhasilan di negara lain, yaitu Jerman. Ini sejalan dengan prinsip para akademisi dan birokrat Jepang, yaitu mempelajari kebijakan yang telah terbukti sukses di negara lain, dan menerapkannya di negara sendiri, dengan revisi seperlunya. Metode ini jauh lebih efisien, dibandingkan dengan merumuskan sendiri dari awal kemudian melakukan uji coba, yang mana mungkin saja gagal total sehingga semua harus diulang dari awal.

Advantages of followership, keuntungan yang berulang kali telah diraup oleh Jepang.